# BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Konteks Penelitian

Usaha mikro adalah jenis usaha yang memiliki skala kecil dan biasanya dikelola oleh individu atau keluarga. Usaha ini sering kali beroperasi dengan modal yang terbatas dan memiliki jumlah karyawan yang sedikit. Di banyak negara, termasuk Indonesia, usaha mikro memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah yang mencakup berbagai aspek utama. Secara ekonomi, usaha mikro berfungsi sebagai pilar perekonomian lokal dengan kemampuannya menciptakan lapangan kerja secara signifikan dan berkelanjutan. Peran ini tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan, tetapi juga berkontribusi pada perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.

Secara strategis, usaha mikro menunjukkan kekuatan dalam menggerakkan sektor informal yang sering kali tidak terjangkau oleh kebijakan ekonomi makro. Melalui usaha mikro, potensi ekonomi lokal dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif setiap wilayah. Dalam perspektif sosial, usaha mikro memainkan peran besar dalam upaya pengentasan kemiskinan. Mereka memberikan peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan modal dan akses, sehingga membantu meningkatkan mobilitas sosial ekonomi. Setiap usaha mikro yang berkembang berpotensi menciptakan efek ganda yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan.

1

Keunggulan lain dari usaha mikro terletak pada fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan ekonomi. Dibandingkan dengan usaha besar, usaha mikro lebih gesit dalam merespons dinamika pasar lokal, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah dalam berbagai kondisi. Selain itu, usaha mikro juga menjadi motor penggerak inovasi dan kreativitas masyarakat dalam menciptakan produk-produk lokal yang khas. Hal ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melestarikan kearifan lokal dan memperkuat daya saing daerah.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Mereka menyediakan pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan untuk membantu UKM berkembang. Selain itu, Dinas ini juga berfungsi sebagai fasilitator dalam menciptakan jaringan usaha, memfasilitasi akses pasar, dan memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan UKM, mereka juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan usaha Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,

Dinas Koperasi dan UKM berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UKM di Kabupaten Bandung. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung juga berperan dalam pengembangan kelembagaan koperasi dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada koperasi yang ada. Mereka melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap koperasi untuk memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai dengan prinsip dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kondisi aktual usaha mikro di Kabupaten Bandung menunjukkan adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usaha. Namun, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang pemasaran dan strategi bisnis, serta keterbatasan akses permodalan. Selain itu, kualitas produk yang rendah dan pemasaran yang belum optimal menjadi hambatan dalam pengembangan usaha mikro di daerah ini. Upaya pemberdayaan melalui pelatihan dan akses pasar terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing usaha mikro.

Berdasarkan data dari rencana strategis tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, untuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Bandung fokus pemberdayaan dan pengembangan usaha pada usaha mikro saja. Jumlah usaha mikro tahun 2022-2024 mengalami peningkatan jumlah total usaha mikro dari tahun 2022 (36.789) ke 2024 (41.377). Ini menunjukkan pertumbuhan positif dalam jumlah total usaha mikro di Kabupaten Bandung.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan jumlah pelaku UMKM yang memiliki sertifikat standar produk, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan upaya melalui program dan kegiatan yaitu program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, dengan kegiatan

Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah, dan Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah.

Program Pengembangan Usaha Mikro yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung merupakan inisiatif menyeluruh yang mencakup beberapa aspek utama, salah satunya yaitu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dalam aspek HAKI, Dinas memberikan pendampingan menyeluruh kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual. Program ini mencakup pendaftaran merek dagang, hak cipta, desain industri, dan paten sederhana. Pelaku UMKM mendapatkan bimbingan mulai dari sosialisasi pentingnya HAKI, penyiapan dokumen, hingga pendampingan proses pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam konteks peningkatan kualitas pelaku usaha, HAKI memiliki peranan yang sangat penting. Pertama-tama, HAKI memberikan jaminan perlindungan terhadap produk dan layanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan ini, pelaku usaha merasa lebih aman untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru. Mereka dapat menciptakan produk yang unik dan berkualitas tanpa khawatir akan penjiplakan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk mereka, baik dari segi inovasi maupun standar produksi.

Untuk mengoptimalkan efektivitas program tersebut, Dinas

menyelenggarakan berbagai kegiatan pendukung seperti pelatihan digitalisasi usaha, pendampingan standardisasi produk, dan konsultasi pengembangan bisnis.

Para pelaku UMKM mendapatkan bimbingan dalam meningkatkan kualitas produk, pengembangan kemasan, dan pemenuhan berbagai standar regulasi yang berlaku. Melalui program HAKI, ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan sektor UMKM yang berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan isu strategis yang terjadi di Dinas Koperasi dan UKM permasalahan program HAKI pada UMKM di Kabupaten Bandung, Salah satu tantangan utama adalah masih banyaknya UMKM yang belum terfasilitasi dalam mendapatkan sertifikat produk HAKI. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi produk, serta kurangnya pendekatan yang menyeluruh dalam memberikan informasi dan dukungan kepada mereka. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui tentang manfaat dan urgensi sertifikasi produk, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperoleh sertifikat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah dari Dinas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman UMKM tentang HAKI, serta memberikan bimbingan yang diperlukan agar mereka dapat memanfaatkan sertifikasi produk secara optimal.

Untuk mencapai suatu efektivitas program Hak Kekayaan Intelektual terhadap peningkatan kualitas usaha mikro di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung masih terdapat permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dalam efektivitas program HKI ini belum maksimal dilakukan dapat dilihat dari faktor yang belum optimal yaitu :

1. Pada sosialisasi program, bahwa pelaku usaha mikro di Kabupaten Bandung masih banyak yang belum paham mengenai pentingnya sertifikasi HKI untuk usaha mereka, hal ini dikarekanakan kurangnya sosialisasi yang menyeluruh akibat kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan sosialisasi

tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membuat penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Terhadap Peningkatan Kualitas Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung”**

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, agar permasalahan yang tercermin dalam latar belakang penelitian lebih terlihat jelas dalam fokus penelitian, sehingga dapat memberikan kejelasan dan mencerminkan pokok permasalahan yang diteliti, maka fokus penelitian yang akan dikaji yaitu bagaimana Efektivitas Program Hak

Kekayaan Intelektual (HAKI) Terhadap Peningkatan Kualitas Usaha Mikro di

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas program Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap peningkatan kualitas Usaha Mikro dan Apa saja faktor yang menghambat dalam efektivitas program Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap peningkatan kualitas Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung ?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat efektivitas program Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap peningkatan kualitas Usaha Mikro dan mengetahui faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan efektifitas program Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap peningkatan kualitas usaha mikro di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Peneltian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan ilmu dan juga pengalaman untuk memperluas wawasan dalam teori – teori yang peneliti dapatkan selama perkuliahan di Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Universitas Pasundan Bandung.

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan alternatif sebagai pemecahan masalah Program Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Terhadap Peningkatan Kualitas Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung.